

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**



DIAJUKAN OLEH:

**PUTU DIANA SRI LESTARI
126232166**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA JAKARTA
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**



DIAJUKAN OLEH:

PUTU DIANA SRI LESTARI

126232166

**LAPORAN AKHIR DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
SYARAT UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI AKUNTAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANEGARA JAKARTA**

2024

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun Oleh:



Putu Diana Sri Lestari
126232166

Disetujui oleh:

Pembimbing



F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, SPI yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan, pengelolaan anggaran, dan aset daerah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan triangulasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menerapkan SPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, efektivitasnya masih jauh dari optimal. Terdapat kelemahan pada lima komponen SPI, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Temuan-temuan tersebut mencakup ketidakcocokan kualifikasi pegawai dengan tugasnya, ketidakmampuan dalam mengelola risiko anggaran, serta kurangnya rekonsiliasi dan pengendalian fisik atas aset daerah. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara pejabat lama dan penggantinya serta ketidaktuntasan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit BPK juga menjadi kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SPI yang lebih baik sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, pengelolaan keuangan daerah, efektivitas, Pemerintah Provinsi Maluku Utara

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the Internal Control System (ISC) on regional financial management in the North Maluku Provincial Government. Transparent and accountable regional financial management is the main key to realizing good governance and improving public welfare. In order to achieve these goals, effective ISC is needed to ensure that financial reporting, budget management, and regional assets are carried out properly in accordance with applicable regulations. This study uses a qualitative descriptive approach with triangulation of data obtained through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that although the North Maluku Provincial Government has implemented ISC in accordance with Government Regulation Number 60 of 2008, its effectiveness is still far from optimal. There are weaknesses in the five ISC components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. These findings include the mismatch of employee qualifications with their duties, inability to manage budget risks, and lack of reconciliation and physical control of regional assets. In addition, the lack of effective communication between the old officials and their replacements and the failure to follow up on the BPK audit recommendations are also obstacles. This study

concludes that better implementation of SPI is needed to improve the effectiveness of regional financial management and increase public accountability.

Keywords: *Internal Control System, regional financial management, effectiveness, North Maluku Provincial Government*

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang tak terhingga oleh karenanya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa kendala apa pun. Proyek akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara.

Banyak nasihat, arahan, inspirasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama mengerjakan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara baik dari Gubernur, Sekda, Kepala BKAD, dan Kepala SKPD terkait yang telah memberikan dukungannya sepanjang penyusunan tugas akhir ini;
2. Dr. Jamaludin Iskak, SE, MSi, Ak, CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, atas perannya sebagai Ketua Program Studi PPAK FEB Universitas Tarumanagara.
3. F.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku pembimbing tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen dan Pegawai PPAK FEB Universitas Tarumanagara.
5. Orang-orang terdekat penulis yang selalu ada untuk dan mendoakan kesuksesan dalam segala hal yang penulis lakukan.

Karya ilmiah ini mempunyai keterbatasan dan penulis berharap agar pembaca dapat merasakan manfaat dari tugas akhir ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan karya ilmiah ini di masa depan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	3
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
A. Gambaran Umum Teori	5
1. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	5
2. Sistem Pengendalian Internal	5
BAB III METODE PENELITIAN	10
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	11
BAB V KESIMPULAN	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern.....	15
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Permasalahan

1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan ciri khas era reformasi di Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. Pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih terdesentralisasi dan otonom selama masa reformasi ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, salah satunya melalui penerapan otonomi daerah, yang memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap keinginan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat. Pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah memberikan keleluasaan dalam membangun ekonomi masyarakat, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat (Nababan & Shahrullah, 2022).

Pengelolaan keuangan daerah mencakup semua aspek fungsi tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada: penyiapan, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi (PP No 12, 2019). Agar pemerintah daerah dapat bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam memenuhi tuntutan masyarakat, pengelolaan keuangan daerah yang baik sangat penting.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan entitas lain yang bertugas mengelola keuangan negara diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, 2006). Setelah itu, para pemeriksa melaporkan hasilnya kepada departemen terkait (DPR, DPD, dan DPRD) sesuai dengan mandatnya.

BPK memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) antara lain. “Kesimpulan auditor atas tingkat kewajaran laporan keuangan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian internal disajikan dalam bentuk opini

dalam pernyataan profesional setelah pemeriksaan LKPD oleh BPK” (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, 2004).

BPK menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) setiap satu semester sebagai ringkasan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Terdapat 543 temuan hasil pemeriksaan keuangan dan 2 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang termasuk dalam 545 objek yang diperiksa IHPS I tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BPK telah memeriksa 542 LKPD pada tahun 2022 dan mencapai simpulan sebagai berikut: 496 (91%) LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 41 (8%) LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 5 (1%) LKPD memperoleh opini Jaminan (TMP).

Pada tahun 2022, BPK telah mengaudit 542 LKPD dan menghasilkan 7.661 temuan, yang meliputi 12.855 masalah terkait kekurangan dan ketidakpatuhan SPI terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, beserta opininya. Nilai temuan tersebut secara keseluruhan mencapai Rp3,07 triliun, meliputi 5.628 kekurangan dan 7.227 masalah ketidakpatuhan SPI. Dari 5.628 masalah tersebut, 1.695 (atau 30%) terkait dengan sistem pengendalian pelaporan dan akuntansi, 2.974 (atau 53%) terkait dengan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 959 (17%) terkait dengan struktur pengendalian internal (Supreme Audit Agency (BPK) RI, 2023).

Sebagai tolok ukur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, hasil audit menunjukkan masih terdapat permasalahan SPI yang dapat memengaruhi opini atas laporan keuangan. Memiliki laporan keuangan yang dapat dipercaya merupakan langkah awal dalam membentuk opini yang solid, dan sistem pengendalian internal yang solid merupakan langkah kedua.

Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan suatu keharusan untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Bulan, Tinangon, dan Mawikere (2017) yang menemukan bahwa SPIP secara signifikan mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah akan lebih efektif apabila SPIP dilaksanakan dengan baik, menurut penelitian tersebut. Demikian pula efektivitas pengelolaan keuangan daerah akan menurun apabila SPIP dilaksanakan dengan buruk.

Pemerintah telah menetapkan peraturan tentang sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu nomor 60 tahun 2008. Pengendalian lingkungan, penilaian risiko, tindakan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian internal merupakan komponen SPIP sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 60 tahun 2008(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Salah satu komponen utama SPIP adalah penggabungan kerangka kerja pengendalian internal tahun 1992 yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring Organisations* (COSO) (SUGIYONO et al., 2021).

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai melalui operasional yang efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dapat dipercaya, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, SPI merupakan suatu proses menyeluruh yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pimpinan secara berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang terorganisasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, maka diperlukan pengendalian internal yang baik. Hal ini akan mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan pemerintahan, yang pada gilirannya akan memotivasi pegawai dan pimpinan untuk memberikan yang terbaik.

Mengevaluasi seberapa baik SPI bekerja dalam mengaudit pengelolaan keuangan daerah dapat membantu para pemangku kepentingan menentukan seberapa akuntabel pengelolaan keuangan daerah dan menunjukkan betapa kecilnya ruang untuk salah saji laporan keuangan jika SPI efektif. Meskipun demikian, implementasi dan efektivitas SPI sering kali menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Rumusan Masalah

Masalah-masalah berikut akan dibahas berdasarkan latar belakang yang diberikan: “Bagaimana efektivitas penerapan sistem pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Maluku Utara?”

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang merupakan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

2. Manfaat Penelitian

Kontribusi akademis yang berkenaan dengan hubungan antara SPI dan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penelitian di masa mendatang, dan penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pentingnya menggabungkan SPI yang efektif ke dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akinleye, G. T., & Kolawole, A. D. (2020). Internal controls and performance of selected tertiary institutions in Ekiti state: A committee of sponsoring organisations (coso) framework approach. *International Journal of Financial Research*, 11(1), 405–416. <https://doi.org/10.5430/IJFR.V11N1P405>
- Awalia, M., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpkd Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1), 51–56. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i1.2045>
- Daerah, P. P. N. 12 T. 2019 tentang P. K. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Espinosa-Jaramillo, M. T. (2024). Internal Control in Companies from the Perspective of the COSO. *Management (Montevideo)*, 2, 28. <https://doi.org/10.62486/agma202428>
- Hayes, R., Wallage P, & Gortemaker H. (2019). *Prinsip-Prinsip Pengauditan (International Standards On Auditing) Edisi 3*.
- Hidajat, N., & Tjakrawala, F. K. (2023). Assessing an Indonesian Credit Union's Internal Control Using COSO ERM Framework: A Case Study at Credit Union Kridha Rahardja. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(12). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i12-104>
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi. Edisi keempat*. Salemba Empat.
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2022). Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Pemerintah Republik Indonesia*, 1(1), 1–128.
- Rif'an Jailani, M., & Tjakrawala, F. X. K. (2023). Analysis of the Effectiveness of Internal Control on the Local Government's Financial Reports in the East Lampung Regency. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 13(11), 226–234. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.13.11.2023.p14324>
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- SUGIYONO, S. U. N., Miqdad, M. M., & Sulistiyo, A. B. S. (2021). Implementation Internal Control System Government With Government Regulation Release of No. 60/2008 in Kpu Jember Regency: a Phenomenology Approach. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 6(2). <https://doi.org/10.20473/jraba.v6i2.132>
- Supreme Audit Agency (BPK) RI. (2023). Overview of Examination Results for the first Semester. *Overview of Examination Result for the First Semester*, 1, 1–288.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. (2004). *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. (2006). *Tentang Badan Pemeriksa Keuangan*.